

**PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
SUMATERA UTARA (PILGUBSU) TAHUN 2018
DI KECAMATAN GALANG**

SKRIPSI

OLEH:

**DITA MANDASARI
148510026**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dita Mandasari

NPM : 148510026

Judul Skripsi : Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (PILGUBSU) Tahun
2018 Di Kecamatan Galang

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Drs.H.M Thamrin Nst.M.Si

Pembimbing I

Walid Musthafa.S.Sos.M.Ip

Pembimbing II



Dr.Hery Kusmanto.MA

Dekan Fisip UMA

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (PILGUBSU) Tahun 2018 Di Kecamatan Galang” adalah hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya pendapat atau temuan dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar sarjana sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 24 Januari 2019

Penulis



Dita Mandasari

NPM : 148510026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, yaitu kemenangan pasangan calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah di Kecamatan Galang, dimana Kecamatan Galang merupakan kecamatan yang multietnis dan agama. Kecamatan Galang yang memiliki beragam etnis/suku seperti Batak, Jawa, Minang, Aceh dan etnis pendatang lainnya. Dari sisi kepercayaan/agama, terdapat beberapa agama yang berkembang di Kecamatan Galang secara berdampingan. Tentunya dengan pemilihan umum secara langsung ini, pemilih dengan menggunakan hak pilihnya dapat menentukan dengan hati nurani dan pemikiran jernih siapa tokoh-tokoh yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memperjuangkan aspirasinya

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uraian teori tentang pemilihan umum, perilaku pemilih, dan partisipasi pemilih. Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Galang dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 100 orang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian bahwa berdasarkan analisa dan evaluasi diperoleh bahwa uji *chi square* menunjukkan bahwa agama (faktor sosiologis), citra/figur calon (faktor psikologis), dan prestasi calon (faktor rasional) memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara di Kecamatan Galang.

Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Pemilihan Umum

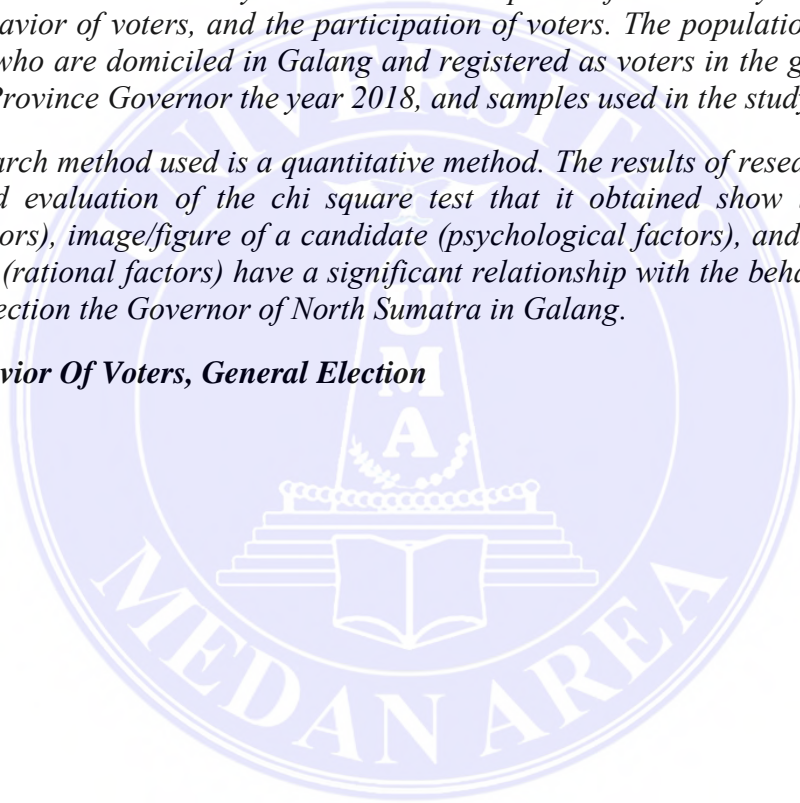
ABSTRACT

This research will be based on research by the existence of a phenomenon that is interesting to note, that the victory of candidate Edy Rahmayadi and Musa Rajekshah in Galang. Galang, where is a town in multi ethnic and religiously. In Galang which has diverse ethnic or tribal like Bataks, Javanese, Minang, Aceh and other ethnic entrants. From the side of belief/religion, there are some religions that developed in the Galang side by side. Of course with general election voters, this directly, by using their voting right can determine with conscience and clear thinking who the figures are qualified and competent to fight for their aspirations

Theories used in this study includes a description of the theory about the general election, the behavior of voters, and the participation of voters. The population of this research are the citizens who are domiciled in Galang and registered as voters in the general election in North Sumatra Province Governor the year 2018, and samples used in the study was 100 people.

The research method used is a quantitative method. The results of research that based on the analysis and evaluation of the chi square test that it obtained show that religion (the sociological factors), image/figure of a candidate (psychological factors), and the achievements of the candidate (rational factors) have a significant relationship with the behavior of the voters at the general election the Governor of North Sumatra in Galang.

Keywords: Behavior Of Voters, General Election



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan. Skripsi ini penulis beri judul : **Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (PILGUBSU) Tahun 2018 di Kecamatan Galang.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Yurial Arif Lubis. S,Sos, M.Ip selaku ketua jurusan Studi Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. M. Husni Thamrin Nst, Msi selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan, motivasi, arahan, nasihat serta meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi dengan baik.
5. Bapak Walid Mustafa, S.sos, M.Ip selaku dosen pembimbing II atas segala kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan Skripsi yang bersifat membangun.
6. Ibu Winda Wati Pinem, S,Sos, Msi yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan proposal ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.
8. Bapak Ketua KPU Deli Serdang dan Camat Galang yang telah memberikan izin riset kepada penulis
9. Khususnya Ibunda tercinta Linda Wati Tarigan dan ayahanda Wiyono yang telah membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan saat ini.
10. Sahabat-sahabat saya Andri Prasetyo SP, Yoga Kashogi S.Ikom, Putri Diah Pangestika S.Ap, Fany Rizka Abadi SP, Sari Rezeki Ramagani S.Kom, Lidya Sari Rahayu, Mutia Sari, M. Vindy Roulfan Damanik S.Ap yang telah membantu dan memberi dukungan kepada saya.
11. Seluruh rekan-rekan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberikan dorongan kepada penulis.

Akhirnya segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Medan, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Hipotesis Penelitian	7
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Uraian Teori.....	9
2.1.1 Tinjauan Pemilihan Umum.....	9
2.1.2 Tujuan dan Fungsi	10
2.1.3 Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu	11
2.1.4 Pemilihan Umum Kepala Daerah	12
2.2 Demokrasi.....	13
2.2.1 Pengertian Demokrasi	13
2.2.2 Demokrasi dalam Pemilu	16
2.3 Perilaku Pemilih	18

2.3.1	Pendekatan Sosiologis	19
2.3.2	Pendekatan Psikologis	20
2.3.3	Pendekatan Rasional	20
2.4	Partisipasi Politik	21
2.5	Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.1.1.	Jenis Penelitian	27
3.1.2.	Lokasi Penelitian	27
3.1.3.	Waktu Penelitian	28
3.2	Populasi dan Sampel	28
3.2.1	Populasi	28
3.2.2	Sampel	29
3.3	Teknik Pengumpulan Data	30
3.4	Instrumen Penelitian	31
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	31
3.6	Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		35
4.1.	Gambaran Lokasi Penelitian	35
4.1.1.	Keadaan Geografis Kecamatan Galang	35
4.1.2.	Keadaan Penduduk Kecamatan Galang	35
4.2.	Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Deli Serdang	37
4.2.1.	Sejarah.....	37

4.2.2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Deli Serdang	41
4.2.3. Data Pemilih Kecamatan Galang	42
4.2.4. Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara di Kecamatan Galang.....	41
4.3. Deskripsi Data Hasil Penelitian	43
4.3.1. Penyajian Data Karakteristik Responden.....	43
4.4. Hubungan Faktor Sosiologis Terhadap Perilaku Pemilih	47
4.4.1. Hubungan Umur Terhadap Perilaku Pemilih.....	47
4.4.2. Hubungan Agama Terhadap Perilaku Pemilih.....	49
4.4.3. Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Perilaku Pemilih	51
4.4.4. Hubungan Pekerjaan Terhadap Perilaku Pemilih	53
4.4.5. Hubungan Etnis/Suku Terhadap Perilaku Pemilih.....	56
4.4.6. Hubungan Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih	58
4.4. Hubungan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Pemilih.....	60
4.4.1. Hubungan Partai Pilihan Terhadap Perilaku Pemilih	60
4.4.2. Hubungan Citra/Figur Terhadap Perilaku Pemilih	63
4.4. Hubungan Faktor Rasional Terhadap Perilaku Pemilih.....	65
4.4.1. Hubungan Visi Misi Terhadap Perilaku Pemilih	65
4.4.2. Hubungan Prestasi Terhadap Perilaku Pemilih.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

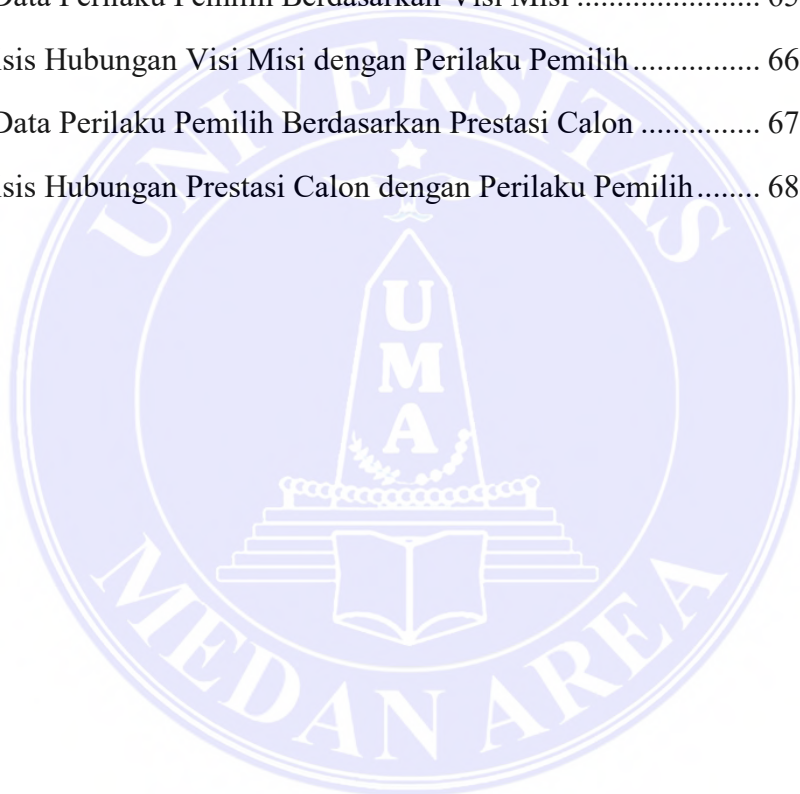
Document Accepted 23/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

DAFTAR TABEL

4.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Galang Tahun 2017	36
4.2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Galang Tahun 2017	36
4.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kecamatan Galang Tahun 2017	37
4.4. Jumlah Pemilih Kecamatan Galang Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.5. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kecamatan Galang	42
4.6. Perolehan Suara Calon Gubernur Sumatera Utara di Kecamatan Galang	43
4.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	43
4.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	44
4.10. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	45
4.11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	45
4.12. Karakteristik Responden Berdasarkan Etnis/Suku	46
4.13. Karakteristik Responden Berdasarkan Pilihan Gubernur	46
4.14 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Umur	47
4.15 Hasil Analisis Hubungan Umur dengan Perilaku Pemilih.....	48
4.16 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Agama.....	49
4.17 Hasil Analisis Hubungan Agama dengan Perilaku Pemilih	50
4.18 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
4.19 Hasil Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Perilaku Pemilih	52
4.20 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Pekerjaan.....	53
4.21 Hasil Analisis Hubungan Pekerjaan dengan Perilaku Pemilih	55
4.22 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Etnis/Suku	56

4.23 Hasil Analisis Hubungan Etnis/Suku dengan Perilaku Pemilih	57
4.24 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Pendidikan	58
4.25 Hasil Analisis Hubungan Pendidikan dengan Perilaku Pemilih	59
4.26 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Partai Pilihan.....	60
4.27 Hasil Analisis Hubungan Partai Pilihan dengan Perilaku Pemilih	62
4.28 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Citra/Figur.....	63
4.29 Hasil Analisis Hubungan Citra/Figur dengan Perilaku Pemilih	64
4.30 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Visi Misi	65
4.31 Hasil Analisis Hubungan Visi Misi dengan Perilaku Pemilih.....	66
4.32 Distribusi Data Perilaku Pemilih Berdasarkan Prestasi Calon	67
4.33 Hasil Analisis Hubungan Prestasi Calon dengan Perilaku Pemilih.....	68



DAFTAR GAMBAR

2.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	26
4.1. Skema Struktur Organisasi KPU Kab. Deli Serdang 2018-2023	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan (*policy*).

Di dalam wacana ilmu politik, bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan metoda atau cara warga atau masyarakat memilih wakil mereka (Anthonius Sitepu : 2012 : 178). Biasanya pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kampanye, dimana para calon kepala daerah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mencari perhatian ataupun simpati masyarakat. Banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala daerah mulai dari memberikan sembako, berkomunikasi kepada rakyat dengan menjabarkan visi dan misi mereka, memberikan pernak pernik partai berupa kaos partai, spanduk, dan bendera, atau bahkan ada beberapa calon kepala daerah yang di lakukan *money politic*. Sudah tidak dapat dirahasiakan lagi bahwasanya hal ini sering terjadi untuk meyakinkan masyarakat agar memilih mereka.

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif

setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pengertian lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pilkada secara langsung pertama kali dipraktekkan di Indonesia sejak 1 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Adapun landasan hukumnya berdasarkan pada pasal Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah o i n i p n n o*". Kemudian dilanjutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berbunyi: "*milih n Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota c l ng ng n mok i*".

Dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan anggaran, maka pemerintah menetapkan pilkada secara serentak. Pemilihan gubernur/ wakil gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Pilkada serentak ini dengan sendirinya akan mampu meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran negara dan ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan langsung (Sidin dalam Purba, 2017).

Pemilihan kepala daerah langsung secara serentak merupakan mekanisme yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2016 atas perubahan UU No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang (*Perppu*) No 1 tahun 2014 tentang *Pemilihan gubernur, bupati, walikota* pada pasal 201 dijelaskan penyelenggaraan pilkada serentak yang dibagi menjadi 7 (tahapan) tahapan, yaitu pilkada serentak 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, dan 2027 yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam UU tersebut.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004. Hal ini sejalan dengan prinsip utama demokrasi dimana setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi politiknya yaitu memilih secara langsung kepala daerahnya. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera, pelaksanaan dan hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara selalu menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 13.000.000 jiwa, Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara merupakan sebuah momen politik penting yang terjadi di Indonesia, khususnya Pulau

Sumatera. Demografi penduduk Sumatera Utara yang heterogen juga menjadi salah satu alasan kenapa Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara menarik untuk diteliti.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara dilaksanakan pada 27 Juni 2018 dan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur. Adapun kedua pasangan tersebut adalah pasangan calon dengan nomor urut 1. Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum yang diusung oleh enam partai politik yaitu Demokrat, Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN dan Nasdem. Pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS dan Dr. Sihar PH Sitorus Pane, BSBA MBA yang diusung oleh dua partai politik yaitu PDIP dan PPP.

Berdasarkan hasil perolehan suara yang diumumkan KPU pada tanggal 8 Juli 2018 maka diketahui bahwa Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah memperoleh 3.291.137 suara atau 57,6% suara sah. Sedangkan Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus hanya memperoleh 2.424.960 suara atau 42,4% suara sah.

Pemilih dengan menggunakan hak pilihnya dapat menentukan dengan hati nurani dan pemikiran jernih siapa tokoh-tokoh yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memperjuangkan aspirasinya. Partai politik dengan berbagai perangkat yang dimilikinya dapat menseleksi siapa saja yang akan dicalonkan, tentunya dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh mekanisme internal partai dan juga memberikan pendidikan politik kepada para anggotanya untuk mempersiapkan supaya siap dipilih dalam proses sirkulasi kepemimpinan baik di partai maupun di tataran jabatan politik.

Sebagai salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, maka Kecamatan Galang ikut melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Kecamatan Galang merupakan kecamatan yang multietnis dan agama. Kecamatan Galang yang memiliki beragam etnis/suku seperti Batak, Jawa, Minang, Aceh dan etnis pendatang lainnya. Dari sisi kepercayaan/agama, terdapat beberapa agama yang berkembang di Kecamatan Galang secara berdampingan. Hal ini menjadikan Kecamatan Galang sebagai kecamatan dengan heterogenitas pemilih yang tinggi.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara di Kecamatan Galang, ada sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, yaitu kemenangan pasangan calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Dimana pasangan calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang tidak berafiliasi secara langsung dengan etnis yang ada di Kecamatan Galang justru berhasil memenangkan perolehan suara terbanyak di Kecamatan Galang yang notabene mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan Batak. Padahal jika dilihat dari seluruh pasangan calon yang ada, terdapat pasangan calon nomor urut dua yang berasal dari suku Jawa dan Batak. Dari sisi popularitas, Djarot Saiful Hidayat sebagai mantan Gubernur Ibukota yang telah dapat dilihat kinerja dan prestasi saat memimpin Provinsi DKI Jakarta juga tak mampu mengangkat suara pasangan ini. Hal inilah yang menurut penulis menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan judul penelitian **“Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (PILGUBSU) Tahun 2018 di Kecamatan Galang”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan faktor sosiologis (umur, agama, jenis kelamin, pekerjaan, etnis/suku, pendidikan) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang?
2. Bagaimana hubungan faktor psikologis (partai pilihan, citra/figur calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang?
3. Bagaimana hubungan faktor rasional (visi misi, prestasi calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang?

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam setiap penelitian perlu dibatasi agar permasalahannya tidak meluas. Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu dibatasi cakupan permasalahan yang lebih sempit. Permasalahan dalam penelitian ini di fokuskan pada perilaku pemilih pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara yang dihubungkan dengan faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional pemilih.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan faktor sosiologis (umur, agama, jenis kelamin, pekerjaan, etnis/suku, pendidikan) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.
2. Untuk menganalisis hubungan faktor psikologis (partai pilihan, citra/figur calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.

3. Untuk menganalisis hubungan faktor rasional (visi misi, prestasi calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang?

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum karena suaranya begitu penting untuk kemajuan bangsa dan negara.

2. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dan informasi baru mengenai hubungan yang mempengaruhi perilaku pemilih pada PILGUBSU Tahun 2018 di Kecamatan Galang.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui hasil penelitian. Menurut Sugiono (2010:84), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).

Berdasarkan rumusan masalah pertama, maka

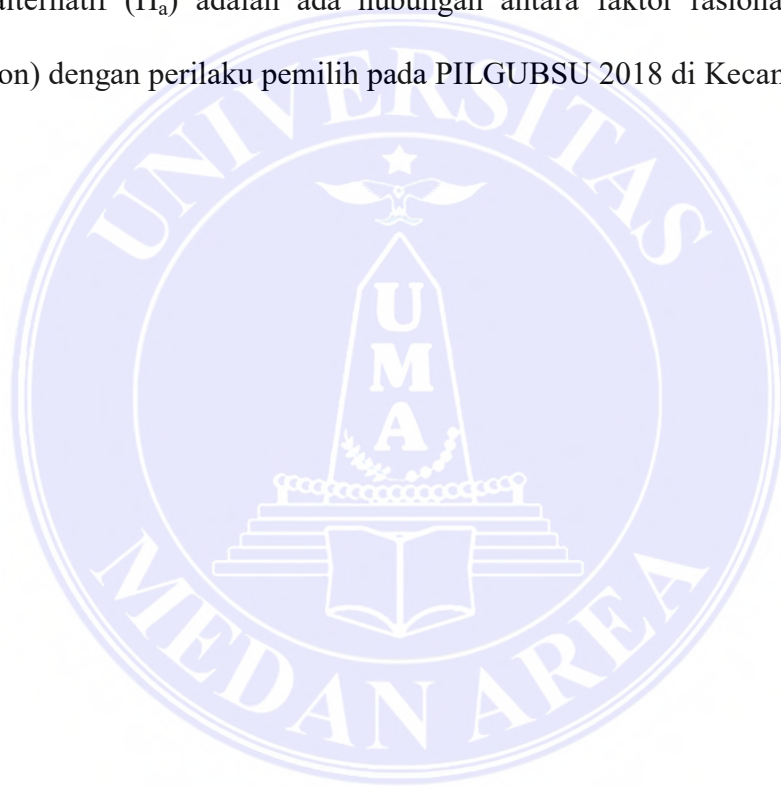
1. Hipotesis nol (H_0) adalah tidak ada hubungan antara faktor sosiologis (umur, agama, jenis kelamin, pekerjaan, etnis/suku, pendidikan) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.
2. Hipotesis alternatif (H_a) adalah ada hubungan antara faktor sosiologis (umur, agama, jenis kelamin, pekerjaan, etnis/suku, pendidikan) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.

Berdasarkan rumusan masalah kedua, maka

1. Hipotesis nol (H_0) adalah tidak ada hubungan antara faktor psikologis (partai pilihan dan citra/figur calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.
2. Hipotesis alternatif (H_a) adalah ada hubungan antara faktor psikologis (partai pilihan dan citra/figur calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, maka

3. Hipotesis nol (H_0) adalah tidak ada hubungan antara faktor rasional (visi misi dan prestasi calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.
4. Hipotesis alternatif (H_a) adalah ada hubungan antara faktor rasional (visi misi dan prestasi calon) dengan perilaku pemilih pada PILGUBSU 2018 di Kecamatan Galang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Tinjauan Pemilihan Umum

Pemilihan (*elections*), sering dipandang sebagai “*the heart of the political process*.” Demikian juga dari sisi lain bahwa pemilihan itu merupakan lambang, sekaligus tolak ukur dan praksis (implementasi) dari prinsip-prinsip demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. (P. Anthonius Sitepu : 2012 :173). Pemilihan umum itu sendiri (*general election*) diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter bahwa pemilihan umum adalah sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara actor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Sejak tahun 2000, semua kecuali 11 negara telah menyelenggarakan pemilu nasional. (Global commission : 2012 : 25). Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan

masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi

Pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, Pemilihan Umum Menurut Jimly Asshiddiqie (Khairul Fahmi : 2012)) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Menurut P. Anthonius Sitepu (2012 : 1790) Fungsi Pemilihan Umum dapat diartikans sebagai :

1. *Recruiting politicians*, fungsi pemilihan umum sebaga rekrutmen politik, dapat dipahami berkaitan dengan negara-negara yang menganut paham demokrasi dipandang bahwa pemilihan umum secara prinsipil sebagai sumber rekrutmen politik. Dengan memilih pemimpin atau pejabat baik dalam bentuk konfirmasi terhadap kepemimpinan politik yang lama. Maupun dengan pengganti pejabat baru dipandang sebagai fungsi pokok pemilihan umum.
2. *Influencing policy*, dalam fungsi pemilihan umum terkait erat dengan perolehan kebijakan (*policy*) yang merujuk kepada kemampuan suatu partai politik untuk menghasilkan outcome yang berbeda jikalau partai politik itu memegang kekuasaan. Artinya, bahwa rencana

kebijakan-kebijakan antara partai-partai politik yang bersaing tidak dengan sendirinya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan alokasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang akan dibentuk pasca pemilihan umum.

3. *Building legitimacy*, bahwa pemilihan umum juga dianggap menjalankan fungsi legitimasi yakni dengan membina hubungan atau dukungan public bagi suatu regime ataupun sebuah sistem politik dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi lembaga-lembaga politik negara. Legitimasi seperti halnya dengan konsep kekuasaan, dan kewenangan, bahwa legitimasi juga ada kaitannya dengan hubungan antara pemerintah (pemimpin) dan masyarakat (yang dipimpin). Maka oleh sebab itu legitimasi adalah sikap masyarakat terhadap kewenangan, apakah masyarakat dapat menerima ataukah mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu disebut legitimasi.

2.1.3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu

Dalam situs resmi KPU adapun yang menjadi dasar hukum bagi Pemilihan Umum di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami pembaharuan dan dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1.4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sejak Juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat Lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri (Prihatmoko dalam Ridho, 2016).

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No.6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan

pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hamper memenuhi parameter demokratis.

2.2. Demokrasi

2.2.1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat (Irawan, 2007).

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan memerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena (Azra, 2005).

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat. Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas

kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Ubaedillah dan Rozak, 2006).

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (Jailani, 2015).

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur,

bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan (Azra, 2005).

1.2.2. Demokrasi dalam Pemilu

Demokrasi dan Pemilihan Umum memiliki kaitan yang sangat erat, dalam demokrasi salah satu parameter untuk mencapai tujuan dari demokrasi adalah Pemilihan Umum yang diartikan sebagai rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Dalam konteks pemilu, mekanisme demokrasi bisa sangat mengecewakan hasilnya mengingat mayoritas rakyat pendidikannya rendah, sebagian elite politik hanya memikirkan diri dan kelompoknya sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi massa yang naif. Lebih mengecewakan lagi, jika kemiskinan rakyat itu dimanipulasi melalui politik uang sehingga hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan roh demokrasi telah dibajak, dirampas, dan dibunuh oleh para elit politisi dengan senjata uang. Menurut Hidayat (2006:44) Demokrasi sarat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu meliputi:

1. Kejujuran

Kejujuran menjadi syarat mendasar dari sebuah kehidupan demokrasi. Sebuah pemerintahan harus secara jujur dalam menjalani kebijakan-kebijakan serta Pertanggung jawabannya.

Nilai ini seharusnya mulai tercermin dalam sistem pemilihan yang merupakan fase awal dari

pelaksanaan demokrasi. Aspirasi rakyat hendaknya disampaikan sesuai hati nurani tanpa dipengaruhi variabel-variabel lainnya.

2. Kebebasan

Demokrasi menjamin kebebasan warganya menyuarakan pendapatnya. Setiap warga bebas berkumpul dan berorganisasi sebagai wujud ekspresi kebebasannya. Masyarakat bebas berpartisipasi sesuai kehendaknya. Pembatasan terhadap kebebasan warga merupakan praktik anti demokrasi.

3. Kepatuhan

Demokrasi memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Rambu-rambu tersebut, atau yang lebih dikenal *rule of law*, menjadi penjaga agar kebebasan berlangsung tertib. Kepatuhan terhadap *rule of law* akan meminimalisir terjadinya chaos dalam kehidupan demokrasi.

4. Persamaan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan. Di depan hukum memiliki ketundukan yang sama terhadap *rule of law*. Di bidang politik memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Di bidang ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghasilan yang layak. Di bidang pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

5. Toleransi

Perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran dalam praktik demokrasi. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting bagi tumbuh berkembangnya demokrasi. Pemaksaan pendapat terhadap orang lain merupakan wujud ketiadaan penghargaan terhadap hak azasi orang lain.

6. Perdamaian

Demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai ke tingkat minimum dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan damai dan secara melembaga. Perubahan dilakukan secara damai dan menghindari terjadinya anarkisme.

7. Fatsoen / Tata Krama

Demokrasi juga mengindahkan fatsoen/tata krama dalam prosesnya. Demokrasi akan tumbuh sehat jika para pihak menjunjung tinggi etika demokrasi. Penyampaian pendapat yang obyektif dan santun, serta tidak cenderung menyebar fitnah adalah cermin dari kedewasaan dalam berdemokrasi. Urbaningrum menyebut Indonesia masih berada dalam situasi melamar demokrasi. Saat ini Indonesia, menurut Anas, masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk reformasi politik yang sekarang sedang dijalani oleh bangsa Indonesia. Jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru yang berjubah demokrasi Pancasila membuka pintu bagi episode politik baru di Indonesia.

1.3. Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*)

Miriam Budiarto (2008) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Menurut Plano, Ringgs, dan Robin dalam Nugraheni (2016) perilaku pemilih yakni kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum serta latar belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu. Kemudian Nasrudin dalam Nugraheni (2016) berpendapat bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah. Secara lebih mendalam Gaffar dalam Nugraheni (2016) menyatakan bahwa perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil

dari masyarakat, karena hal itu hanya menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Secara teoritis ada dua penjelasan teori mengapa seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan. Penjelasan pertama bersumber dari teori-teori mengenai perilaku pemilih (*voter behavior*). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (*voting turnout*) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih. *Secara umum analisa-analisa mengenai “voting behaviour” atau perilaku pemilih didasarkan pada tiga pendekatan atau model* (Husni Kamil : 2016 : 100) yaitu:

2.3.1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis atau yang dikenal dengan mazhab Columbia pada intinya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, agama, hal ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik. Pendekatan ini menyakini bahwa masyarakat itu terstruktur oleh norma-norma dasar sosial dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan membentuk perilaku pemilih.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologi (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik

seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang (Asfar dalam Ridho : 2016 : 7).

2.4.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dikenal sebagai mazhab Michigan menekankan bahwa penentu pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik. Pendekatan ini menjelaskan perilaku memilih melalui kedekatan terhadap calon ataupun partai politik, sikap suka terhadap calon. Hal ini yang kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan calon nya kelak.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang (Asfar dalam Ridho : 2016 :7).

2.4.3 Pendekatan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik. Pusat perhatian pendekatan in mengenai perilaku pemilih yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat. Pada tingkat ini ada pemilih yang memperhitungkan biaya dan manfaat secara pragmatis. Kategori pemilih seperti ini biasanya lebih banyak dipengaruhi pada untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Serta biasanya mereka melihat dari visi dan misi calon kepala daerah.

1.4. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi masyarakat menjadi komponen utama dalam setiap pelaksanaan pemilu hal ini dikarenakan partisipasi mengandaikan adanya keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pemilu yang secara politik menjadi legitimasi bagi perjalanan politik kebangsaan di tanah air (Husni Kamil : 2016 : 85). Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan – kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan –kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Miriam Budiardjo : 2008 : 367).

Lebih jauh dia mengingatkan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), kedua, partisipasi kelompok (*group participation*), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (*citizen government contacting*) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.

Sedangkan Arifin Rahmat (1998:128) mendefinisikan, *partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah*. Dengan demikian, pengertian Huntington dan Nelson dibatasi beberapa hal, yaitu: **pertama**, Huntington dan Nelson mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik,

keefektifan politik, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik. **Kedua**, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini didasarkan pada pejabat-pejabat yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa. **Ketiga**, kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik. Dengan itu protes- protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pembrontak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik. **Keempat**, partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. **Kelima**, partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan kepemerintah.

Sudjiono (1995;74) Perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua , yaitu:

1. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

2. Partisipasi Pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Selain kedua bentuk partisipasi diatas *Rush dan althoff* menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada dinilai telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga tidak ikut serta dalam politik. orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat beberapa julukan, seperti *apatis, sinisme, alienasi, dan anomie*.

1. *Apatis* (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
2. *Sinisme* menurut Agger diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
3. *Alienasi* menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungannya berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
4. *Anomie*, yang oleh Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

2.5. Kerangka Pemikiran

Seperti apa yang telah diuraikan dalam landasan teori Perilaku pemilih merupakan tindakan individu yang penting dalam memberikan suara pada pemilihan langsung, dimana hal ini menyangkut keputusan individu untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat atau partai

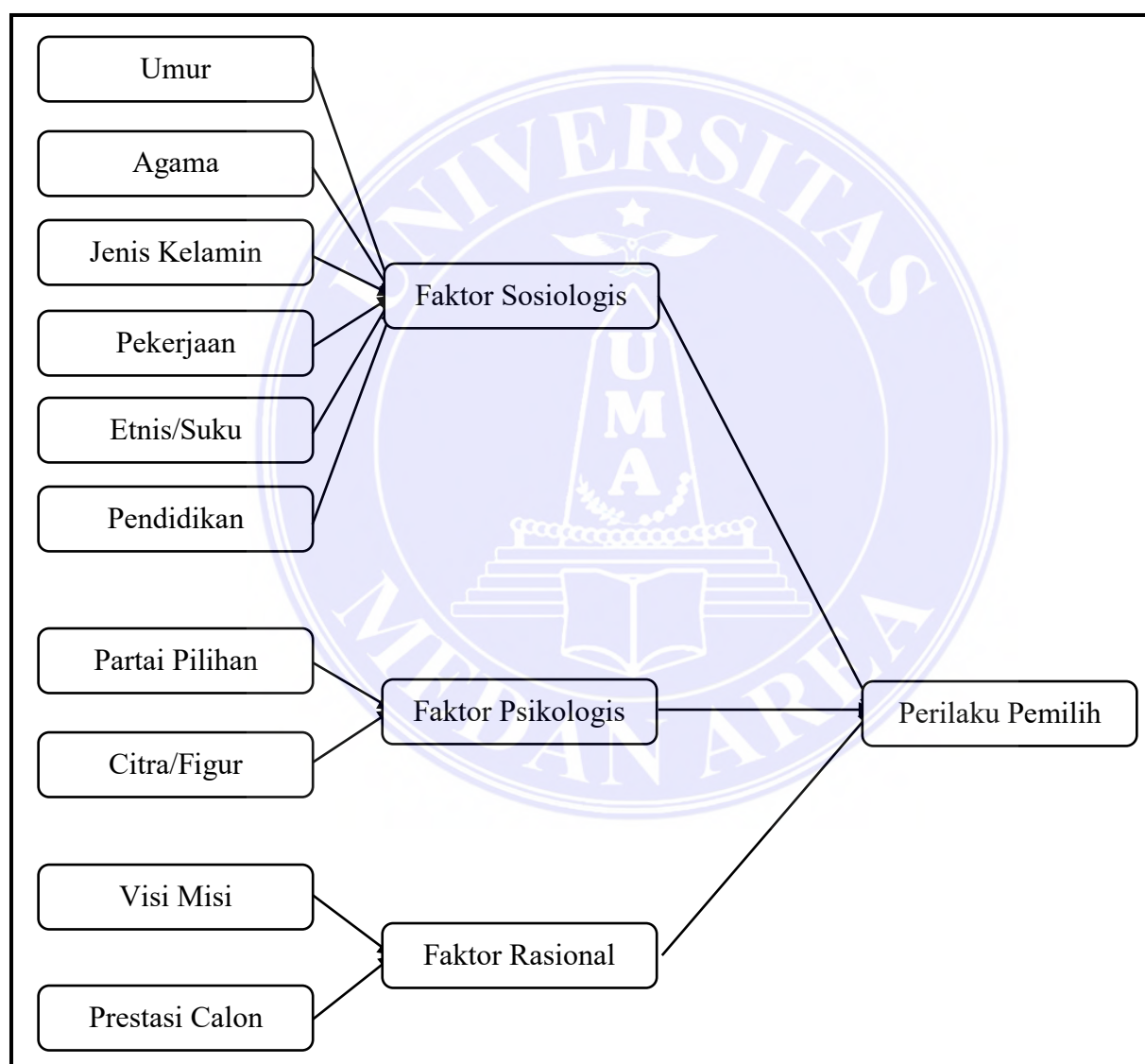
tertentu yang dianggap tepat untuk menduduki jabatan politis tertentu. Proses pergantian kepemimpinan inilah sebagai wujud dari demokrasi, keikutsertaan dalam pemilu merupakan hal paling penting menggunakan suara guna menentukan siapa yang menjadi pemimpin kedepannya.

Calon kepala daerah yang sudah terpilih diharapkan mampu mengemban amanah yang telah diberikan dan mampu menyeleksi aspirasi masyarakat jika terpilih dan sesuai dengan Undang-Undang bahwa partai politik atau calon tersebut secara hukum sah untuk mewakili masyarakat yang memilihnya. Wakil-wakil inilah yang nantinya menentukan kebijakan dari berbagai aspek dan kebijakan itu akan kembali kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibuat.

Dalam menentukan pilihannya masyarakat baik individu maupun kelompok dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan diantaranya visi misi calon, dan kualitas kandidat, faktor budaya (sosio cultural) dan peran pemimpin tradisional juga merupakan hal yang perlu diperhatikan disamping beberapa faktor umum lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas tiga pendekatan yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami hubungannya dengan perilaku pemilih di Kecamatan Galang. Ketiga pendekatan ini diturunkan menjadi faktor-faktor digunakan untuk mengukur pola perilaku pemilih masyarakat dengan indikator sebagai berikut

- 1) Faktor sosiologis yang diukur dari faktor umur, agama, jenis kelamin, pekerjaan, etnis/suku, dan pekerjaan pemilih.
- 2) Faktor psikologis yang diukur dari partai pilihan dan citra/figur calon.
- 3) Faktor rasional yang diukur dari visi misi dan prestasi calon.

Dengan ketiga faktor perilaku pemilih tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kecamatan Galang dan seberapa besar hubungan dari ketiga faktor tersebut. Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kuantitatif yang diartikan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial untuk dapat melakukan pengukuran setiap fenomena sosial dijabarkan kedalam komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan katagori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan penggunaan.

Penelian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta, variabel, atau fenomena yang terjadi sekarang. Ketika penelitian ini berlangsung dan menjanjikannya sesuai dengan data yang ada.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kuantitatif dengan

ditetapkannya lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

3.1.3. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																		
2	Seminar Proposal								■																
3	Perbaikan proposal									■	■	■	■												
4	Penelitian																	■	■						
5	Penyusunan Skripsi																			■	■				
6	Seminar Hasil																				■				
7	Perbaikan Skripsi																						■		
8	Sidang Meja Hijau																								■

1.2 Populasi dan Sampel

1.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010:61), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 27 Juni 2018. Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara sebanyak 27.649 Jiwa.

3.1.1. Sampel

Data dikumpulkan dengan cara mengambil sampel secara acak atau dengan kata lain disebut sampling. Sampel penelitian meliputi sejumlah responden yang lebih besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 orang sampel.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang pemilih yang berdasarkan pada metode Slovin dengan rumus (Supriana : 2016 : 44) :

$$\frac{27.649}{100} =$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir yaitu 10%

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan jenis *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel

berdasarkan faktor spontanitas yang artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik atau ciri-cirinya yaitu masyarakat/penduduk di Kecamatan Galang yang terdaftar sebagai pemilih dan melaksanakan hak politiknya sebagai pemilih, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (responden) sebagai dasar pengumpulan data. Sampel penelitian ditargetkan berjumlah 100 orang sampel yang dipilih secara tidak sengaja.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara langsung lokasi penelitian atas gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, sehingga melalui proses ini peneliti berusaha mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung tentang keadaan sosial dan ekonomis penduduk Kecamatan Galang sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian yang diharapkan.

2. Pengisian Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang

efisien apa bila peneliti tahu pasti variabel yang ingin diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan pada responden. Pada penelitian ini kuesioner atau angket yang digunakan adalah angket tertutup teknik ini dipilih karena memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan dapat memudahkan peneliti dalam mengambil data.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian metode kuantitatif dari penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden akan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan peneliti.

3.4. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat variabel-variabel yang digunakan yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor rasional, dan perilaku pemilih. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa penjelasan tentang variabel sebagai berikut :

1) Faktor Sosiologis (X1)

Faktor sosiologis adalah faktor yang menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, karakteristik latar belakang sosiologis seperti agama, jenis kelamin dan umur serta kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, dan daerah asal. Adapun pengukuran masing-masing variabel tersebut berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

Variabel hubungan (X1) adalah faktor sosiologis dengan perilaku pemilih sebagai berikut :

- Umur
- Agama
- Jenis Kelamin
- Pekerjaan
- Etnis/Suku
- Pendidikan

2) Faktor Psikologis (X2)

Faktor psikologis adalah faktor yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik, pendekatan psikologi mengembangkan konsep psikologi khususnya. Faktor psikologis menekankan pada tiga pokok psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, terhadap isu-isu dan terhadap kandidat/calon serta identifikasi terhadap orang tua. Adapun pengukuran masing-masing variabel tersebut berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

Variabel hubungan (X2) adalah faktor psikologis dengan perilaku pemilih sebagai berikut :

- Partai Pilihan Pemilih
- Citra/Figur Calon yang meliputi gaya berbicara, gaya penampilan dan pesona fisik.

3) Faktor Rasional (X3)

Faktor rasional adalah faktor yang menilai isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap visi misi politik yang diajukan oleh kandidat, dengan mempertimbangkan perhitungan untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya dan prestasi yang pernah diraih kandidat sebelumnya. Adapun pengukuran masing-masing variabel tersebut berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

Variabel hubungan (X3) adalah faktor rasional dengan perilaku pemilih sebagai berikut :

- Visi Misi Calon Gubernur.
- Prestasi Kandidat Calon Gubernur.

4) Perilaku Pemilih (Y)

Perilaku pemilih adalah sikap/perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin daerah. Dalam hal ini memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Variabel terpengaruh (Y) perilaku pemilih dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara dilihat dari:

- Pilihan pemilih terhadap Calon gubernur Sumatera Utara yaitu pasangan calon nomor urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah atau pasangan calon nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Data yang terkumpul diolah untuk mengetahui angka yang berkaitan dengan variabel X (faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional) dan variabel Y (perilaku pemilih). Teknik analisis data yang digunakan yaitu

1. Analisis Bivariat

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Chi Square*. Uji *Chi Square* dilakukan dengan melihat perbedaan antara jumlah pengamatan suatu objek atau respon tertentu pada tiap klasifikasinya terhadap nilai harapannya (*expected value*). Dengan kata lain *uji chi square* melakukan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang diselidiki atau frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji chi square dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu SPSS 17 berbentuk komputer dengan signifikan $p > 0,05\%$ (dengan taraf kepercayaan 95%). (Supriana dan Rianti ; 2013 ; 87).



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Azra, A. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ubaedillah, A dan A. Rozak. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Hidayat, K. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Prenada Media
- Commission, Global. 2012. *Pendalaman Demokrasi*. Jakarta : Global Commission.
- Huntington, Samuel. 1990. *Partisipasi politik di Negara berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sitepu, Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Supriana, T dan Rianti B. 2013. *Statistik Nonparametrik*. Medan : USU Press.
- Supriana, T. 2016. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Medan : USU Press.

- **Skripsi/Jurnal/Publikasi Online**

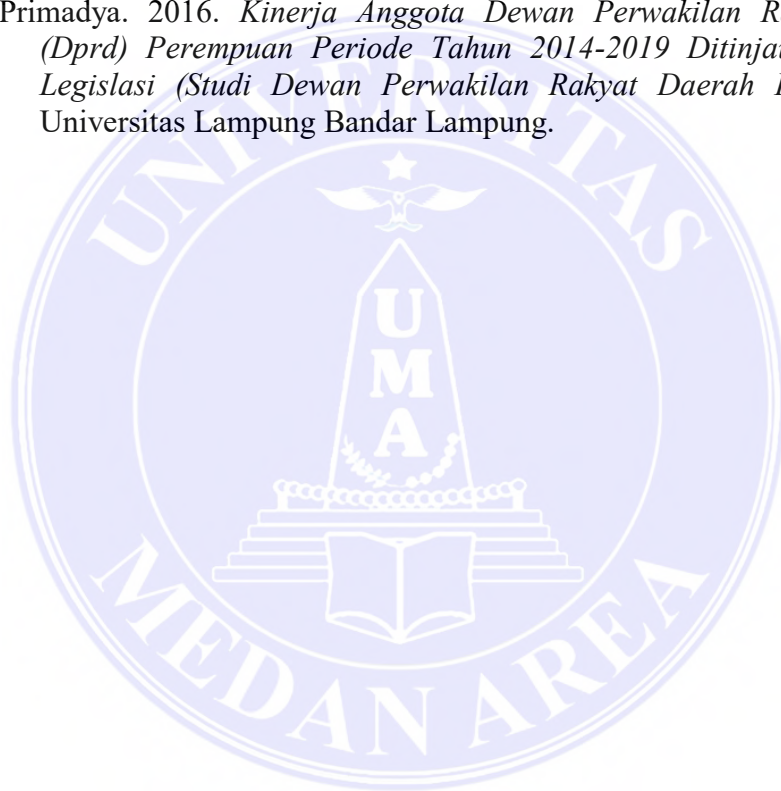
- Jailani. 2015. *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Inovatif. Volume III No. I.
- Irawan, B.B. 2007. *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 5 No. 1.
- Nugraheni, D. 2016. *Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa*. Skripsi tak diterbitkan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kamil, Husni. 2016. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Kasus Pada*

Daerah Pemilihan di Kecamatan Gunung Meriah. Komisi Pemilihan Umum.

Purba, C.C, 2016. *Hubungan Faktor Sosiologis Dan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan Tahun 2015 Di Kecamatan Bandar Petalangan (Studi Kasus Desa Lubuk Keranji Timur dan Desa Kuala Semundam)*. Pekanbaru : Jurnal FISIP Universitas Riau

Ridho, M. 2016. *Perilaku Pemilih Masyarakat Batak Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi tak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Rosa, Primadya. 2016. *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau Dari Aspek Legislasi (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)* Universitas Lampung Bandar Lampung.



LAMPIRAN

1. Identitas Responden

No	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Agama	Etnis/Suku	Pekerjaan
1	55	Perempuan	S1	Islam	Jawa	PNS
2	21	Perempuan	SMA	Islam	Batak	IRT
3	24	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Wirausaha
4	50	Perempuan	SMP	Islam	Jawa	IRT
5	39	Perempuan	D3	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
6	55	Perempuan	SMA	Islam	Batak	PNS
7	35	Perempuan	SMA	Islam	Minang	IRT
8	49	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Wirausaha
9	44	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
10	19	Perempuan	SMA	Islam	Batak	Pelajar
11	65	Laki - Laki	SMP	Islam	Jawa	Wirausaha
12	60	Perempuan	SMP	Islam	Jawa	IRT
13	42	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	IRT
14	44	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Pegawai Swasta
15	19	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
16	24	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Pegawai Swasta
17	60	Laki - Laki	S1	Islam	Batak	Tidak Bekerja
18	24	Laki - Laki	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
19	24	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
20	26	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Buruh
21	20	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Pegawai Swasta
22	53	Perempuan	S1	Islam	Jawa	PNS
23	25	Laki - Laki	S1	Islam	Batak	Pegawai Swasta
24	28	Perempuan	S1	Islam	Jawa	IRT
25	56	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Wirausaha
26	43	Perempuan	SMP	Islam	Batak	IRT
27	45	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Wirausaha
28	39	Perempuan	SMA	Islam	Batak	IRT
29	35	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	IRT
30	50	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Pegawai Swasta
31	19	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Buruh
32	19	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Buruh
33	36	Perempuan	SMA	Islam	Batak	IRT
34	43	Perempuan	SMP	Islam	Jawa	IRT
35	30	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	IRT
36	29	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta

37	22	Perempuan	S1	Islam	Batak	Pegawai Swasta
38	22	Laki - Laki	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
39	22	Laki - Laki	S1	Islam	Batak	Pegawai Swasta
40	20	Laki - Laki	S1	Islam	Batak	Pegawai Swasta
41	24	Laki - Laki	D3	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
42	42	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	Wirausaha
43	52	Laki - Laki	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
44	29	Perempuan	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
45	35	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Pegawai Swasta
46	20	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pelajar
47	54	Perempuan	SMA	Islam	Batak	Wirausaha
48	35	Perempuan	SMA	Islam	Batak	IRT
49	54	Laki - Laki	S1	Islam	Batak	Pegawai Swasta
50	52	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	PNS
51	51	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Wirausaha
52	56	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
53	24	Laki - Laki	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
54	24	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
55	24	Laki - Laki	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
56	24	Laki - Laki	S1	Islam	Batak	Pegawai Swasta
57	25	Laki - Laki	SMA	Islam	Batak	Buruh
58	25	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	IRT
59	17	Laki - Laki	SMP	Islam	Jawa	Pelajar
60	58	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Tidak Bekerja
61	55	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	IRT
62	28	Perempuan	D3	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
63	22	Perempuan	S1	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
64	61	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Wirausaha
65	19	Perempuan	SMA	Islam	Batak	Pelajar
66	50	Laki - Laki	SMP	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
67	48	Perempuan	SMA	Kristen	Batak	IRT
68	22	Laki - Laki	S1	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
69	18	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	Pelajar
70	47	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	PNS
71	43	Perempuan	SMA	Kristen	Batak	PNS
72	52	Laki - Laki	SMP	Islam	Jawa	Wirausaha
73	48	Perempuan	SMA	Kristen	Batak	PNS
74	23	Perempuan	D3	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
75	53	Laki - Laki	SMA	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
76	20	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	Pelajar
77	25	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Buruh
78	36	Laki - Laki	SMA	Kristen	Batak	Buruh
79	49	Perempuan	SMP	Kristen	Melayu	Pegawai Swasta

80	27	Laki - Laki	SMA	Kristen	Batak	Wirausaha
81	19	Laki - Laki	SMA	Kristen	Batak	Pelajar
82	22	Perempuan	SMA	Islam	Batak	Pelajar
83	18	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pelajar
84	64	Perempuan	SD	Kristen	Batak	Tidak Bekerja
85	59	Laki - Laki	SD	Kristen	Batak	IRT
86	29	Perempuan	SMK	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
87	25	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pegawai Swasta
88	61	Laki - Laki	SD	Kristen	Batak	Wirausaha
89	58	Laki - Laki	SMP	Islam	Jawa	Wirausaha
90	24	Laki - Laki	SMA	Islam	Melayu	Pegawai Swasta
91	24	Perempuan	D3	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
92	22	Perempuan	S1	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
93	25	Perempuan	SMA	Kristen	Batak	Wirausaha
94	33	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	IRT
95	17	Laki - Laki	SMA	Islam	Jawa	Pelajar
96	65	Laki - Laki	SMA	Kristen	Batak	Wirausaha
97	22	Perempuan	SMA	Islam	Jawa	Pelajar
98	23	Laki - Laki	S1	Islam	Jawa	Wirausaha
99	22	Laki - Laki	SMA	Kristen	Batak	Pegawai Swasta
100	17	Perempuan	SMA	Kristen	Batak	Pelajar



2. Skoring Faktor Sosiologis (Umur, Agama, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Etnis/Suku, Pendidikan) Terhadap Perilaku Pemilih

Y	X11	X12	X13	X14	X15	X16
1	2	1	2	7	1	5
2	1	1	2	2	2	3
1	1	1	1	6	2	3
2	2	1	2	2	1	2
1	2	1	2	5	1	4
1	2	1	2	7	2	3
1	1	1	2	2	3	3
1	2	1	1	6	1	3
1	2	1	1	5	1	3
2	1	1	2	3	2	3
1	3	1	1	6	1	2
1	3	1	2	2	1	2
2	2	1	2	2	1	3
2	2	1	1	5	2	3
2	1	1	1	5	1	3
1	1	1	1	5	2	3
1	3	1	1	1	2	5
1	1	1	1	5	1	5
1	1	1	1	5	1	3
1	1	1	1	4	2	3
1	1	1	1	5	2	3
1	2	1	2	7	1	5
1	1	1	1	5	2	5
1	1	1	2	2	1	5
1	3	1	1	6	1	3
1	2	1	2	2	2	2
1	2	1	1	6	1	3
1	2	1	2	2	2	3
1	1	1	2	2	1	3
2	2	1	1	5	2	3
2	1	1	1	4	2	3
1	1	1	1	4	2	3
1	1	1	2	2	2	3
1	2	1	2	2	1	2
1	1	1	2	2	1	3
1	1	1	1	5	1	3
1	1	1	2	5	2	5

1	1	1	1	5	1	5
1	1	1	1	5	2	5
1	1	1	1	5	2	5
1	1	1	1	5	1	4
1	2	1	2	6	1	3
1	2	1	1	5	1	5
1	1	1	2	5	1	5
1	1	1	1	5	2	3
1	1	1	1	3	1	3
1	2	1	2	6	2	3
1	1	1	2	2	2	3
1	2	1	1	5	2	5
1	2	1	2	7	1	3
2	2	1	1	6	1	3
2	3	1	1	5	1	3
1	1	1	1	5	1	5
1	1	1	1	5	1	3
1	1	1	1	5	1	5
1	1	1	1	5	2	5
1	1	1	1	4	2	3
2	1	1	2	2	1	3
1	1	1	1	3	1	2
1	3	1	1	1	1	3
2	2	1	2	2	1	3
2	1	1	2	5	1	4
2	1	1	2	5	1	3
2	3	1	1	6	1	3
1	1	1	2	3	2	3
1	2	2	1	5	2	2
2	2	2	2	2	2	3
2	1	2	1	5	2	5
1	1	1	2	3	1	3
1	2	1	1	7	1	3
1	2	2	2	7	2	3
1	2	1	1	6	1	2
2	2	2	2	7	2	3
2	1	2	2	5	2	4
2	2	2	1	5	2	3
1	1	1	2	3	1	3
1	1	1	1	4	1	3
1	1	2	1	4	2	3

1	2	2	2	5	4	2
1	1	2	1	6	2	3
1	1	2	1	3	2	3
1	1	1	2	3	2	3
1	1	1	1	3	1	3
2	3	2	2	1	2	2
2	3	2	1	2	2	1
1	1	1	2	5	1	3
1	1	1	1	5	1	3
2	3	2	1	6	2	1
1	3	1	1	6	1	3
1	1	1	1	5	4	3
1	1	2	2	5	2	4
2	1	2	2	5	2	5
2	1	2	2	6	2	3
1	1	1	2	2	1	3
1	1	1	1	3	1	3
1	3	2	1	6	2	3
1	1	1	2	3	1	3
2	1	1	1	6	1	5
2	1	2	1	5	2	3
1	1	2	2	3	2	3

Keterangan :

X11 = Umur

X12 = Agama

X13 = Jenis Kelamin

X14 = Pekerjaan

X15 = Etnis/Suku

X16 = Pendidikan

Skoring X11

- 1 = Umur 17-35 Tahun
- 2 = Umur 36 – 55 Tahun
- 3 = Umur 56+ Tahun

Skoring X12

- 1 = Islam
- 2 = Kristen

Skoring X13

- 1 = Laki – Laki
- 2 = Perempuan

Skoring X14

- 1 = Tidak Bekerja
- 2 = Ibu Rumah Tangga
- 3 = Pelajar
- 4 = Buruh
- 5 = Pegawai Swasta
- 6 = Wirausaha
- 7 = Pegawai Negeri Sipil

Skoring X15

- 1 = Jawa
- 2 = Batak
- 3 = Minang
- 4 = Melayu

Skoring X16

- 1 = SD
- 2 = SMP
- 3 = SMA
- 4 = Diploma
- 5 = Sarjana

Skoring Y

- 1 = Memilih Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah
- 2 = Memilih Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus

3. Skoring Faktor Psikologis (Partai Pilihan dan Citra/Figur) Terhadap Perilaku Pemilih



Y	X21	X22
1	2	1
2	5	1
1	3	2
2	5	1
1	1	3
1	3	3
1	2	1
1	4	3
1	2	3
2	1	1
1	5	3
1	2	3
2	2	2
2	3	1
2	5	1
1	4	1
1	4	1
1	2	3
1	5	3
1	3	2
1	5	3
1	3	3
1	4	3
1	4	3
1	2	3
1	5	3
1	1	1
1	2	1
1	2	1
2	1	2
2	2	2
1	3	3
1	5	3
1	2	3
1	4	1
1	4	1
1	2	1
1	4	3
1	3	2
1	3	3
1	4	1

1	4	1
1	3	3
1	4	3
1	2	3
1	4	2
1	2	2
1	3	1
1	3	1
1	1	2
2	1	3
2	2	1
1	5	1
1	1	2
1	3	3
1	2	3
1	3	3
2	1	1
1	1	1
1	2	2
2	1	2
2	1	2
2	2	2
2	2	3
1	2	1
1	1	3
2	1	3
2	1	1
1	3	2
1	2	2
1	1	3
1	1	3
2	2	1
2	1	1
2	3	2
1	2	1
1	1	1
1	1	1
1	2	3
1	3	2
1	3	3
1	2	3
1	2	2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

2	3	1
2	2	1
1	3	1
1	2	3
2	2	1
1	5	1
1	4	3
1	2	1
2	3	1
2	3	1
1	2	3
1	2	3
1	2	1
1	1	1
2	3	3
2	2	1
1	3	2

Keterangan ;

X21 = Partai Pilihan

X22 = Citra/Figur

Skoring X21

- 1 = PDIP
- 2 = Golkar
- 3 = Gerindra
- 4 = PKS
- 5 = Demokrat

Skoring X22

- 1 = Gaya Penampilan
- 2 = Gaya Berbicara
- 3 = Pesona Fisik

4. Skoring Faktor Rasional (Visi Misi dan Prestasi Calon) Terhadap Perilaku Pemilih

Y	X31	X32
1	1	1
2	2	1
1	2	2

2	2	1
1	1	2
1	2	2
1	1	2
1	2	2
1	2	1
2	2	1
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	1	2
2	1	1
1	2	2
1	2	1
1	1	1
1	2	2
1	1	2
1	2	2
1	2	2
1	1	2
1	2	2
1	2	2
1	2	2
1	1	2
1	1	2
1	2	1
2	2	1
2	1	1
1	2	2
1	2	1
1	1	2
1	2	2
1	2	2
1	1	1
1	1	2
1	2	2
1	1	2
1	1	2
1	2	2
1	2	2
1	2	2
1	2	2
1	2	2
1	2	2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1	1	2
1	2	2
1	1	2
1	2	2
1	2	1
2	2	1
2	1	1
1	1	2
1	2	1
1	1	2
1	2	2
1	2	2
2	2	2
1	2	2
1	2	1
2	2	2
2	2	2
2	1	2
2	2	1
1	2	1
1	1	2
2	1	1
2	2	1
1	2	2
1	2	2
1	2	2
1	2	1
2	2	1
2	2	1
2	2	2
1	2	1
1	2	2
1	2	2

1	2	1
1	2	2
1	2	2
1	1	2
1	1	2
2	1	2
2	2	2
1	2	2

1	1	2
2	2	1
1	2	1
1	1	2
1	1	2
2	2	2
2	2	2
1	2	1
1	1	2
1	2	1
1	2	2
2	1	1
2	2	1
1	1	1

Keterangan ;

X31 = Visi Misi

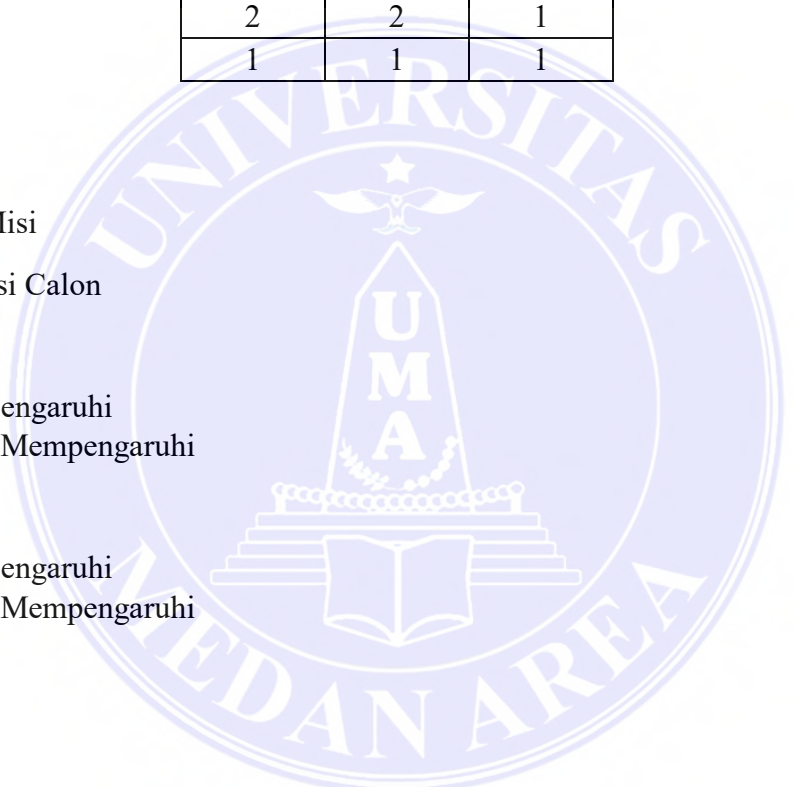
X32 = Prestasi Calon

Skoring X31

- 1 = Mempengaruhi
- 2 = Tidak Mempengaruhi

Skoring X32

- 1 = Mempengaruhi
- 2 = Tidak Mempengaruhi



KUESIONER

PERILAKU PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018

Data Responden & Faktor Sosiologis Pemilih

Nama :

Umur :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Agama :

Pekerjaan :

Etnis/Suku :

Karakteristik PILGUBSU 2018

1. Apakah anda menggunakan hak pilih dalam PILGUBSU 2018?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apa alasan utama anda menggunakan hak pilih PILGUBSU 2018?
 - a. Karena kesadaran pribadi sebagai warga negara
 - b. Karena ingin memenangkan calon gubernur/wakil gubernur pilihan saya
 - c. Karena ajakan orang tua, teman, saudara, kerabat
 - d. Karena memperoleh imbalan (uang, sembako, dll)
 - e. Karena

Perilaku Pemilih

3. Siapakah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang anda pilih dalam PILGUBSU 2018?
 - a. Letjan (Purn) Edi Rahmayadi dan Musa Rajeckshah
 - b. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus

Faktor Psikologis

9. Partai politik apa yang anda jadikan sebagai preferensi politik anda?
 - a. PDIP
 - b. Golkar
 - c. PKB
 - d. PPP
 - e. Gerindra
 - f. Nasdem
 - g. Demokrat
 - h. PKS

10. Apa yang menjadi alasan anda memilih partai tersebut sebagai preferensi?

.....
..
.....
..
.....
..

11. Siapa pengaruh terbesar anda dalam memilih partai politik pilihan tersebut?

- a. Keluarga
- b. Teman
- c. Media Massa/Elektronik
- d. Iklan/Kampanye Partai

12. Apakah Citra/Figur Calon menjadi dasar anda dalam memilih?

- a. Ya
- b. Tidak

13. Apa yang menjadi alasan anda dalam menilai citra/figur kandidat yang ada dalam PILGUBSU 2018?

- a. Gaya Penampilan
- b. Gaya Berbicara
- c. Pesona Fisik (Tinggi/Tampan)

14. Sosok figur/citra seperti apa yang anda harapkan menjadi gubernur Sumatera Utara?

.....
..
.....
..
.....
..

Faktor Rasional

15. Apakah anda mempertimbangkan visi misi calon sebagai dasar memilih gubernur pilihan?

- a. Ya
- b. Tidak

16. Apakah visi misi calon mempengaruhi anda dalam menentukan pilihan?
a. Mempengaruhi
b. Tidak Mempengaruhi

17. Jika tidak, apa yang menjadi alasan anda?

.....
..
.....
..
.....
..

18. Apakah anda mempertimbangkan prestasi calon sebagai dasar memilih gubernur pilihan?
c. Ya
d. Tidak

19. Apakah prestasi calon mempengaruhi anda dalam menentukan pilihan?
c. Mempengaruhi
d. Tidak Mempengaruhi

20. Jika tidak, apa yang menjadi alasan anda?

.....
..
.....
..
.....
..

21. Apa yang menjadi saran anda dalam pelaksanaan PILGUBSU?

.....
..
.....
..
.....
..